**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DI KABUPATEN MAJENE**

SRI ASTUTY RATNASARI MANGGU dan HERIANI

Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi Barat-Indonesia

Email: sriastutyrm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi dalam hal ini adalah tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang ada. Data penelitian ini diperoleh dari pembagian kuesioner. Penelitian ini berdasarkan hasil output SPSS yang dilihat dari nilai signifikansi, nilai yang diperoleh adalah 0,037 lebih kecil dari standar yang digunakan yakni $0,037 < 0,05$. Selain dari nilai signifikansi, dapat dilihat juga dari perbandingan nilai t hitung dan t tabel. Berdasarkan hasil output diperoleh nilai t hitung sebesar 2,116 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,984. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu $2,116 > 1,984$ maka hipotesis (H_1) diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan variable tingkat pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Kata Kunci : Tingkat Pemahaman, Wajib Pajak Orang Pribadi, Kewajiban Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup besar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. *Self assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang

dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimasukkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan. Begitu pula dalam hal penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. Selain itu secara tidak langsung, perubahan sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Menurut Sumarsa (2012), Pajak adalah Perikatan oleh wajib pajak dengan negara secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan. Pajak merupakan aturan yang lahir dari undang-undang yang bernuansa publik sehingga bersifat memaksa. Pajak berada dalam pengawasan pejabat pajak sebagai pihak yang mewakili negara secara langsung kepada wajib pajak. Sifat yang dimiliki oleh wajib pajak adalah bersifat memaksa dan tercermin dari aspek penagihannya yang dalam hal ini diatur dengan adanya ancaman hukuman berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi berbagai kewajiban perpajakannya. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Numantu yang dikutip dalam Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kondisi menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan.

Namun di sisi lain, fenomena yang ada adalah tingkat pemahaman masyarakat atas berbagai peraturan perpajakan umumnya masih cukup rendah. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Majene, berdasarkan hasil pra penelitian dengan melakukan berbagai wawancara dengan masyarakat, umumnya masyarakat belum memahami berbagai peraturan perpajakan yang ada. Hal ini menarik dan kemudian menjadi dasar peneliti melakukan penelitian tentang analisis tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berfokus pada wajib pajak orang pribadi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tergambar dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Majene.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner yang kemudian dilakukan pengolahan secara statistik dengan menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh variabel X yaitu tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Majene.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdapat di 4 kecamatan di Kabupaten Majene meliputi: WP OP Sendana, WP OP Pamboang, WP OP Banggae, dan WP OP Banggae Timur, dengan jumlah wajib pajak berjumlah 3.402 WP OP. Lokasi pengambilan sampel berada di wilayah Kabupaten Majene yaitu dipilih dari 4 kecamatan tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel dengan metode *Convenience Sampling* atau sampel yang mengambil secara acak dengan menghampiri setiap orang yang berada dalam lokasi yang sama.

Berikut adalah tabel persebaran kuesioner pada setiap daerah di Kabupaten Majene:

Tabel 1. Jumlah Persebaran Kuesioner

NO	Daerah Penyebaran Kuesioner	Jumlah yang Disebarkan	Jumlah yang Kembali	Jumlah yang Tidak Kembali
1	Sendana	25 Kuesioner	25 Kuesioner	-
2	Pamboang	25 Kuesioner	25 Kuesioner	-
3	Banggae	25 Kuesioner	25 Kuesioner	-
4	Banggae Timur	25 Kuesioner	25 Kuesioner	-
	JUMLAH	100 Kuesioner	100 Kuesioner	0 Kuesioner

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dari penelitian ini diukur dengan indikator yang digunakan pada penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang terdiri dari 7 pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel kepatuhan wajib pajak dari jawaban kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Skor Pernyataan	(1) Sangat tidak setuju		(2) Tidak setuju		(3) Kurang setuju		(4) Setuju		(5) Sangat setuju	
	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)
1	0	0%	0	0%	0	0%	43	43%	57	57%
2	0	0%	0	0%	0	0%	51	51%	49	49%
3	0	0%	0	0%	0	0%	51	51%	49	49%
4	0	0%	0	0%	0	0%	53	53%	47	47%
5	0	0%	0	0%	0	0%	53	53%	47	47%
6	0	0%	1	1%	18	18%	37	37%	44	44%
7	0	0%	0	0%	0	0%	49	49%	51	51%
Jumlah	0		1		18		337		344	

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang menjadi sampel paling banyak memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan tentang kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan 4 sebanyak 51 responden (51%) menjawab setuju. Tidak satupun responden menjawab pernyataan kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju dalam pernyataan 4. Artinya sesuai dengan pernyataan 4 Wajib Pajak telah menjaga ketertiban administrasi perpajakan dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan Wajib Pajak patuh kegiatan perpajakan. Demikian juga pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, tak satupun responden menjawab pernyataan sangat tidak setuju. Dapat dikatakan Wajib Pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pada Wilayah Kabupaten Majene.

Jumlah seluruh jawaban setiap pernyataan tentang kepatuhan Wajib Pajak untuk kategori sangat setuju adalah 344 jawaban, setuju 337 jawaban, kurang setuju adalah 18 jawaban, kurang setuju 1 jawaban dan sangat tidak setuju 0 jawaban. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan- pernyataan tentang kepatuhan wajib pajak, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak cukup tinggi.

B. Statistik Deskriptif Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan pada penelitian ini diukur dengan indikator yang terdiri dari 6 pernyataan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Peraturan Pajak

Skor Pernyataan	(1) Sangat tidak setuju		(2) Tidak setuju		(3) Kurang setuju		(4) Setuju		(5) Sangat setuju	
	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)	Σ	(%)
1	0	0%	0	0%	4	4%	56	56%	40	40%
2	0	0%	0	0%	0	0%	59	59%	41	41%
3	0	0%	0	0%	7	7%	58	58%	35	35%
4	0	0%	0	0%	9	9%	67	26%	24	24%
5	0	0%	0	0%	26	26%	44	44%	30	30%
6	0	0%	0	0%	17	17%	56	56%	27	27%
Jumlah	0		0		63		340		197	

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang menjadi sampel, responden paling banyak memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan tentang pemahaman peraturan perpajakan. Pada pernyataan 2 sebanyak 59 responden (59%) menjawab setuju, artinya wajib pajak sudah memahami terkait dengan pernyataan wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jumlah seluruh jawaban dari setiap pernyataan tentang kepatuhan Wajib Pajak untuk kategori sangat setuju adalah 197 jawaban, setuju 340 jawaban, kurang setuju 63 jawaban, sedangkan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada jawaban. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan-pernyataan tentang pemahaman peraturan perpajakan. Hal ini dapat diartikan responden telah memahami tentang aturan yang berlaku untuk wajib pajak maka dapat dikatakan pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak cukup tinggi.

C. Analisis Regresi Linear

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.661	2.634		9.741	.000
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	.219	.103	.209	2.116	.037

a. Dependent Variable: Tingkat pemahaman

Dapat ditentukan persamaan regresinya berdasarkan kolom B yang merupakan koefisien regresi tiap variabelnya. Jadi persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 25,661 + 0,219X$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar 25,661; artinya apabila X, nilainya 0 nilai Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 25,661%
- b) Koefisien regresi variabel X sebesar 0,219; artinya apabila X dinaikkan 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,219% dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.

D. Pengujian Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.661	2.634		9.741	.000
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	.219	.103	.209	2.116	.037

a. Dependent Variable: Tingkat pemahaman

a) Hipotesis

H_0 = tingkat pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H_1 = tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

b) Tingkat Signifikan

Tingkat Signifikan yang digunakan adalah 0.05 ($\alpha = 5\%$), berdasarkan tabel 4.5. signifikansi variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,037. Artinya tingkat signifikansi variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan lebih kecil dari standar signifikansi, sehingga dapat dikatakan bahwa H_1 diterima.

c) Menentukan t hitung

Menentukan t hitung dari tabel 4.5 berdasarkan tabel hasil diatas, maka t hitung variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan sebesar 2,116.

d) Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$: $2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1$ atau $100 - 2 - 1 = 97$. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0.025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,984.

e) Kriteria pengujian

Ho diterima jika $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$

Ho ditolak jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$

f) Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}

Nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,116 > 1,984$)

Berdasarkan hasil output SPSS yang dilihat dari nilai signifikansi, nilai yang diperoleh adalah 0,037 atau 37,0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan, hal tersebut diperkuat karena tingkat signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari standar yang digunakan yakni $0,037 < 0,05$. Selain dari nilai signifikansi, dapat dilihat juga dari perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan hasil output diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,116 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} yaitu $2,116 > 1,984$ maka hipotesis (H_1) diterima.

Berdasarkan kedua perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil output SPSS yang dilihat dari nilai signifikansi, nilai yang diperoleh adalah 0,037 lebih kecil dari standar yang digunakan yakni $0,037 < 0,05$. Selain dari nilai signifikansi, dapat dilihat juga dari perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan hasil output diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,116 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} yaitu $2,116 > 1,984$ maka hipotesis (H_1) diterima.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana.
- Ghoni, Husen Abdul. 2012. *Pengaruh Motivasi Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 1 Tahun 2012. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Purwono, Herry 2010., *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- S. R, Soemarso. 2007. *Perpajakan, pendekatan komprehensif*. Jakarta: Salemba
- Sumarsa 2012:4 *Kepatuhan dan Kesadaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widayati dan Nurlis, SE.AK.Msi. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga)*. Jurnal Akuntansi Vol. 17 No. 2, 2011. *Jenderal Soederman*.